

**DAFTAR BACAAN**

**BUKU**

Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007

Arliman S., Laurensius, *Lembaga-Lembaga Negara Independen (Di Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)*, Deepublish, Yogyakarta, 2019

Atmasasmita, Romli, *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2007

\_\_\_\_\_, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2010

Darumurti, Krishna D. *Kekuasaan Diskresi Pemerintah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012

Djatmiati, Tatiek Sri, *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2012

DPR RI, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, DPR RI, Jakarta, 2019

Effendi, Tolib, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Berbagai Negara*, Medpress, Yogyakarta, 2013

Fahrojih, Ikhwan, *Hukum Acara Pidana Korupsi*, Setara Press, Malang, 2016

Fatoni, Syamsul, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan: Perspektif Teoritis dan Pragmatis untuk Keadilan*, Setara Press, Malang, 2016

Fionda, Julia, *Public Prosecutors and Discretion: A Comparative Study*, Clarendon Press Oxford, 1995

Hadjon, Philipus M. *Pengertian-Pengertian Dasar tentang Tindak Pemerintahan (Bestuurshandeling)*, Djumali, Surabaya, 1985

\_\_\_\_\_, dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2017

Hamzah, Andi, *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Bandung, 1986

- \_\_\_\_\_, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- \_\_\_\_\_, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- \_\_\_\_\_ dan RM Surachman, *Pre-trial Justice dan Discretionary Justice dalam KUHAP Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Harahap, Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- \_\_\_\_\_, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Hartanto, Margo Hadi Putra, dan Oci Senjaya, *Hukum Tindak Pidana Khusus*, Deepublish, Yogyakarta, 2020
- Husin, Kadri dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Harun et.al, *Hukum Administrasi di Era Citizen Friendly*, MUP, Surakarta, 2018
- Ilmar, Aminuddin. *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenada Media, Jakarta, 2014
- Indrayana, Denny, *Don't Kill KPK*, ICW, Jakarta, 2016
- Isra, Saldi, *Catatan Hukum Saldi Isra: Kekuasaan dan Perilaku Korupsi*, Buku Kompas, Jakarta, 2009
- Jahja, Juni Sjafrien, *Prinsip Kehati-hatian dalam Memberantas Manajemen Koruptif pada Pemerintahan dan Korporasi*, Visimedia, Jakarta, 2013
- Johan, Teuku Saiful Bahri. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2018
- Kartayasa, Mansur, *Korupsi dan Pembuktian Terbalik dari Perspektif Kebijakan Legislasi dan Hak Asasi Manusia*, Kencana, Jakarta, 2017
- Lamintang, PAF, dan C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1985
- Lamintang, PAF, dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP, Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Kencana, Jakarta, 2010

- Latif, Abdul, *Hukum Administrasi dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua*, Kencana, Jakarta, 2016
- Luna, Erik, dan Marianne Wade, *The Prosecutor in Transnational Perspective*, Oxford University Press, 2012
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017
- Marbun, S.F. *Hukum Administrasi Negara I (Administrative Law I)*, FHUII Press, Yogyakarta, 2012
- Marpaung, Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Minarno, Nur Basuki, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2009
- Mawardi, Irvan, *Paradigma Baru PTUN, Respon Peradilan Administrasi terhadap Demokratisasi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2016
- Mudzakkir, *Laporan Akhir Tim Kompedium Hukum tentang Lembaga Pemberantasan Korupsi*, Kemenkumham RI, Jakarta, 2011
- Napitupulu, Diana, *KPK in Action*, RAS, Depok, 2010
- Nugroho, FH Edy, *Konsep dan Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta, 2019
- Nurdjana, IGM, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Pramukti, Angger Sigit et.all, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016
- Purwoleksono, Didik Endro, *Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Press (AUP), Surabaya, 2015
- \_\_\_\_\_, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press (AUP), Surabaya, 2016
- \_\_\_\_\_, *Hukum Pidana Untaian Pemikiran*, Airlangga University Press (AUP), Surabaya, 2019
- Qamar, Nurul dan Farah Syah Rezah, *Ilmu dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, SIGn, Makassar, 2020

- R., A. Sakti Ramdhon Syah, *Perundang-Undangan Indonesia*, SIGn, Makassar, 2020
- S., Laurensius Arliman, *Lembaga-Lembaga Negara Independen (Di Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)*, Deepublish, Yogyakarta, 2019
- S., Maria Farida Indrati, *Ilmu Peraturan Perundang-Undangan 2*, Kanisius, Yogyakarta, 2007
- Sasangka, Hari, et.al, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, dan Praperadilan*, Dharma Surya Berlian, Surabaya, 1996
- Siahaan, Monang, *Penyakit Penyakit Sosial yang Mematikan*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2013
- Seno Adji, Indriyanto, et.al, *Pengajuan Oleh Publik (Public Review) Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, ICW, Jakarta, 2016
- Sjafrien Jahja, Juni, *Prinsip Kehati-hatian dalam Memberantas Manajemen Koruptif pada Pemerintahan dan Korporasi*, Visimedia, Jakarta, 2013
- Soesilo, R, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*, Politeia, Bogor, 1974
- Sofyan, Andi dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016
- \_\_\_\_\_ dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014
- Supardi, *Perampasan Harta Hasil Korupsi*, Kencana, Jakarta, 2018
- Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2018
- \_\_\_\_\_, *Hukum Acara Pidana*, Zifatama Jawara, Sidoarjo, 2018
- Syamsu, M. Ainul, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2016
- Syamsudin, M. dan Salman Luthan, *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*, Prenadamedia, Jakarta, 2018
- Tim SPORA, *Pengantar Kelembagaan Antikorupsi*, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputusan Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2015
- Witanto, D.Y. *Hukum Acara Praperadilan dalam Teori dan Praktik*, Imaji Cipta Karya, Depok, 2019

Yusni, Muhammad, *Keadilan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Perspektif Kejaksaan*, AUP, Surabaya, 2019

Zulfa, Eva Achjani, *Gugurnya Hak Menuntut*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197. Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409).

### **PUTUSAN PENGADILAN**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VI/2008

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014

Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 90/Pid.Prap/2015/PN. Jkt.Sel

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta 32/Pid.Prap/2015/PN. Jkt.Sel.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 15/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XVII/2019

### **JURNAL/ HASIL PENELITIAN**

Alfitra, *Disparitas Putusan Praperadilan dalam Penetapan Tersangka Korupsi oleh KPK*, Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta Vol.4 No.1(2016), pp.73-86,DOI: 10.15408/jch.v4i1.3201.2016.4.1.73-86

Damaska, Mirjan, „*The Reality of Prosecutorial Discretion: Comments on A German Monograph*”, The American Journal of Comparative Law, 1981

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Praperadilan, Tinjauan Juridis Pasca putusan Mahkamah Konstitusi*, diakses dari <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10852>, tanggal 08/09/2020

Palupi Kurnianingrum, Trias, *Revisi UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi: Melemahkan Kinerja KPK?*, Info Singkat Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Vol. XI, No. 18/II/Puslit/September/2019

Pratiwi, Nur Ayu, *Penetapan Tersangka Korupsi oleh KPK tanpa Bukti Permulaan yang Cukup sebagai Dasar Permohonan Praperadilan ditinjau dari Asas Due of Process*, Jurnal Verstek Volume 5 Nomor 3 Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Rachman, Taufik, *Dasar Teori Kewenangan Penyidik Perkara Pidana*, Yuridika Vol. 25 No. 1, Januari–April 2010: 13–32

\_\_\_\_\_, *Can the Indonesian criminal justice system be enhanced by replacing the mandatory prosecution system with a discretionary one, like that used in Australia?*, Thesis Ph.D. Victoria University. 2016.

Safrina, Anne, W.M. Herry Susilowati, dan Maria Ulfah, *Penghentian Penyidikan: Tinjauan Hukum Administrasi dan Hukum Acara Pidana*, MIMBAR HUKUM Volume 29, Nomor 1, Februari 2017

### **INTERNET**

*Jadi Tersangka Korupsi sejak 2016, KPK Panggil Mantan Rektor Unair*, diakses dari <https://www.suara.com/news/2019/12/12/120248/jadi-tersangka-korupsi-sejak-2016-kpk-panggil-mantan-rektor-unair>, tanggal 25/10/2020 jam 00.32

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Praperadilan, Tinjauan Juridis Pasca putusan Mahkamah Konstitusi*, diakses dari <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10852>, tanggal 08/09/2020 jam 18.30